

**PERWUJUDAN TATA PEMERINTAHAN YANG BAIK (*GOOD GOVERNANCE*) DI  
LAGGAI (DESA) MAILEPPET KECAMATAN  
SIBERUT SELATAN KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI**

**Ice Tresnawati Satoko, Dr. Sanidjar Pebrihariati.R S.H,M.H,  
Helmi Chandra Sy S.H,M.H**

**Program Studi Ilmu Hukum Program Kekhususan Hukum Tata Negara Universitas  
BungHatta**

Email : [icetresnawatisatoko21@gmail.com](mailto:icetresnawatisatoko21@gmail.com)

**ABSTRAK**

Desa adalah sistem kemasyarakatan yang teratur menurut peran, status dan fungsi masing-masing yang mengacu pada nilai dan norma yang berlaku. Rumusan masalah pada penelitian ini yaitu 1.) Apa sajakah upaya yang dilakukan kepala Desa dan perangkat Desa dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*) di Laggai Maileppet Kecamatan Siberut Selatan Kabupaten Kepulauan Mentawai 2.) Apa sajakah yang menjadi faktor pendukung dan penghambat terciptanya Pemerintahan yang baik (*good governance*) di *Laggai* Maileppet Kecamatan Siberut Selatan Kabupaten Kepulauan Mentawai 3.) Apa yang menjadi kendala-kendala dalam mewujudkan tata Pemerintahan yang baik (*good governance*) di *Laggai* Maileppet Kecamatan Siberut Selatan Kabupaten Kepulauan Mentawai. Metode Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, dengan sumber data primer dan sekunder serta teknik pengumpulan data menggunakan studi dokumen dan wawancara, data yang terkumpul di analisis secara analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa; 1.) upaya Kepala Desa dan Perangkat Desa dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik di Laggai Maileppet telah menerapkan (sembilan) 9 prinsip *good governance* terdiri dari Partisipasi, Penegakan Hukum, Transparansi, Daya Tanggap, Berorientasi Konsensus, Berkeadilan, Efektivitas dan Efisiensi, Akuntabilitas, dan Bervisi Strategi. 2.) Faktor pendukung dan penghambat dalam perwujudan tata Pemerintahan yang baik yaitu dalam pilar transparansi adalah memberikan akses yang terbuka ke semua kalangan dalam setiap prosesnya, dalam pilar akuntabel adalah bentuk wujud tanggung jawab yaitu setia dan memegang teguh janji, dalam bentuk partisipasi yaitu gotong royong menjadi bagian dari upaya konsolidasi dan penguatan komunitas untuk melapangkan cita-citanya, sedangkan faktor penghambat yaitu, kurangnya partisipasi Aparat Desa dalam berbagai kegiatan yang dilaksanakan di *Laggai*, dan faktor keamanan yang belum diadakan di setiap Dusun yang ada di *Laggai*. 2.) Kendala-kendala umum dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik yaitu, fasilitas yang kurang, tingkat pendidikan yang masih rendah, tidak disiplin jam kerja, sedikit sekali agenda *Laggai* untuk melaksanakan pelatihan-pelatihan, adanya miskomunikasi antara atasan dan karyawan.

**Kata Kunci : *Laggai* (Desa), Pemerintahan, *Good Governance***